

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Hasil penelitian di Sekolah Menengah Kejuruan Kencana Bandung bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen menunjukkan bahwa *Praktek Kerja Industri* [waktu (X_1) dan penempatan (X_2)] tidak ada hubungan dengan *Peningkatan Keterampilan Siswa* (Y). Hal ini terbukti dari hasil uji statistik uji t, baik dari uji t korelasi berganda maupun dari korelasi parsilnya yaitu nilai t hitung di bawah nilai tabel. Seperti terlihat hasil uji t korelasi berganda menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, di mana nilai t_{a1} adalah 1.21 dan t_{a2} adalah - 0.38. Nilai t_{a1} (1.21) dan t_{a2} (- 0.38) lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 1.69.
2. Waktu (X_1) dan penempatan (X_2) menyumbang terhadap peningkatan keterampilan sebesar tiga persen yaitu R^2 (0.03).
3. Praktek kerja industri tidak ada hubungannya dengan peningkatan keterampilan disebabkan :
 - a) Waktu praktek kerja industri masih relatif singkat.
 - b) Penempatan praktek kerja industri kadang-kadang belum sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

- c) Materi yang diajarkan di sekolah belum menunjang kegiatan di tempat praktek.
- d) Siswa praktek kurang aktif bertanya terutama dengan kegiatan yang kurang sesuai dengan materi di sekolah.

5.2 SARAN SARAN

Saran-saran ini ditujukan kepada :

A. SEKOLAH

1. Kerjasama antara sekolah dengan perusahaan atau instansi hendaknya lebih ditingkatkan sehingga sekolah dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan atau instansi.
2. Perusahaan atau instansi perlu dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan praktek kerja industri, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara sekolah dan perusahaan.
3. Untuk meningkatkan hasil praktek kerja industri, sebaiknya sekolah mengundang nara sumber dari perusahaan atau instansi untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan kurikulum di sekolah.

4. Guru yang berkaitan dengan materi kegiatan praktek kerja industri, sebaiknya diikutsertakan dalam bimbingan dan pengawasan seperti guru akuntansi, perpajakan, perkantoran atau penjualan. Diharapkan guru dapat mengetahui kondisi lapangan sebenarnya dan memperoleh wawasan, pengalaman serta keterampilan.
5. Kepala Sekolah dan guru yang terkait dengan materi praktek kerja industri diharapkan lebih banyak mengikuti seminar, diskusi panel atau penataran yang berkaitan dengan materi praktek kerja.
6. Sekolah bertanya kepada pihak perusahaan melalui survei kebutuhan, kriteria apa dan bagaimana yang diharapkan oleh perusahaan dari lulusan SMK, agar sekolah dapat mempersiapkan lulusan dan mampu memenuhi sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diinginkan dunia kerja.

B. PERUSAHAAN ATAU INSTANSI

1. Sebaiknya perusahaan atau instansi bersedia menerima praktek kerja industri siswa SMK bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen dalam rangka mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab terhadap pendidikan .

2. Perusahaan atau instansi memberikan pra orientasi praktek agar memudahkan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.
3. Instruktur (pembimbing) dari perusahaan atau instansi lebih meningkatkan bimbingan dan pelatihan kepada siswa SMK selama praktek kerja industri.
4. Apabila ada penerimaan karyawan, sebaiknya perusahaan atau instansi mengutamakan siswa SMK yang berprestasi untuk diangkat sebagai karyawan.
5. Perusahaan atau instansi dapat menempatkan siswa praktek sesuai dengan yang diharapkan sekolah baik kurikulum maupun bidang keahliannya.

C. PEMERINTAH

1. Meningkatkan anggaran untuk SMK, khususnya bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen baik dalam bentuk peralatan maupun sarana lainnya yang menunjang praktek kerja.
2. Mendirikan dan mengembangkan pusat pelatihan keterampilan SMK bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen seperti BLPT untuk SMK bidang Keahlian Teknik.
3. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dalam membuat kurikulum dan mengevaluasi hasil praktek kerja

SMK bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen sebaiknya mengikutsertakan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru bidang studi terkait dan perusahaan.

4. Perusahaan atau instansi agar mengeluarkan surat keterangan untuk siswa yang telah mengikuti praktek kerja.
5. Mendirikan lembaga yang dapat menyelenggarakan sertifikasi keahlian yang diakui oleh pemerintah.
6. Pemerintah menyelenggarakan penataran mengenai metodologi kependidikan untuk instruktur perusahaan atau instansi supaya instruktur perusahaan atau instansi mengetahui bagaimana cara menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa pada saat praktek.
7. Pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi tentang Pendidikan Sistem Ganda (PSG) kepada perusahaan atau instansi agar perusahaan atau instansi mengerti dan memahami makna PSG.
8. Pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan kurikulum kejuruan, perlu mengenal dan memahami wawasan dunia kerja (kondisi nyata dilapangan), sehingga kurikulum dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja.
9. Sebaiknya kurikulum jangan sering mengalami perubahan karena membuat kesulitan tenaga operasional dilapangan.